



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pada tahun 2016 tahapan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Namun pada hakikatnya seluruh fokus pembangunan tersebut memiliki satu tujuan yang sama yakni pencapaian visi Gubernur terpilih selaku kepala daerah. Pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2016 ini, tema yang diusung adalah **“Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah”**. Meskipun terkesan fokus pembangunan periode ini adalah peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan peningkatan kualitas maupun kuantitas aksesibilitas wilayah, namun berbagai aspek prioritas lain tetap merupakan unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menyempurnakan langkah-langkah tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Gubernur, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam mencapai visi dan misi Gubernur memerlukan sinkronisasi baik antar sektoral maupun antar waktu agar tahapan-tahapan pembangunan daerah dapat selaras antar periode. Jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD 2016 harus merujuk pada program dan prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Sehingga alur kedua dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling tumpang tindih. Sesuai dengan peruntukannya, perencanaan pada



dokumen RKPD 2016 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam SKPD provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah pendanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

1. Prioritas pembangunan melalui Belanja Tidak Langsung diperuntukkan untuk :
2. Memenuhi gaji dan Tunjangan PNS dan Tunjangan Anggota DPRD.
3. Hibah pendidikan, biaya operasional sekolah, hibah daerah otonomi khusus.
4. Bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
5. Bantuan Keuangan untuk insentif guru, BOSDA, TUTOR PAUD, Puskesmas 24 jam dan PPL Pertanian dll.

Perioritas Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta penunjang lainnya, yang dibagi menjadi urusan Wajib dan urusan Pilihan.

1. 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan
- 5) Penataan ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perhubungan
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Pertanahan
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 13) Sosial
- 14) Ketenagakerjaan
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil menengah



- 16) Penanaman Modal Daerah
- 17) Kebudayaan
- 18) Pemuda dan Olahraga
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
- 21) Kepegawaian
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan
- 25) Komunikasi dan informatika
- 26) Perpustakaan

2. 8 (delapan) Urusan Pilihan ;

- 1) Pertanian
- 2) Kehutanan
- 3) Energi dan Sumber daya Mineral
- 4) Parawisata
- 5) Kelautan dan Perikanan
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Ketransmigrasian

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2016

Adapun program dan kegiatan prioritas pembangunan RKPD tahun 2016 sebagai berikut :

I. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. DINAS PENDIDIKAN
 - 1) Program pendidikan non formal
 - 2) Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
 - 3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - 4) Program pendidikan menengah
 - 5) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat



- 6) Program peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan
2. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
 - 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
 - 1) Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

1. DINAS KESEHATAN
 - 1) Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - 2) Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
 - 3) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - 4) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 6) Program standarisasi pelayanan kesehatan
 - 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

III. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. DINAS PENDIDIKAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
2. DINAS KESEHATAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan
3. DINAS SOSIAL
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan
 - 2) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
4. BIRO EKONOMI
 - 1) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)



5. BPM dan PEMERINTAHAN DESA
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan KB
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan
8. DINAS KEHUTANAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan
9. DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
10. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
11. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

IV. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. DISNAKERTRANS
 - 1) Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
 - 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja



- 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. DINAS SOSIAL
 - 1) Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
4. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
 - 1) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

V Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 2) Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
 - 1) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
3. BAPPEDA
 - 1) Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan daerah
4. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. BIRO EKONOMI
 - 1) Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

VI. Percepatan Transformasi Ekonomi

1. BADAN PERIJINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
 - 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 3) Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
2. DINAS PERINDUSTRIAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
 - 2) Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir



- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- 5) Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
3. DINAS PERKEBUNAN
 - 1) Program Perluasan Kebun Sawit
 - 2) Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan daerah
4. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
 - 1) Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan
 - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

VII. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

- 1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 - 1) Program diversifikasi energi
 - 2) Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - 3) Program pengembangan listrik pedesaan
- 2 PLN / Swasta
 - 1) Program diversifikasi energi
- 3 DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan

VIII. Pengembangan Agrobisnis

1. DINAS PERKEBUNAN
 - 1) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non sawit
2. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan



3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. DINAS PERINDUSTRIAN KOPRASI DAN UMKM
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri olahan non migas

IX. Penguatan Cadangan Pangan

1. DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
 - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - 2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - 3) Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian
 - 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
 - 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan
 - 2) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
 - 3) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
 - 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)
3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
5. DINAS PETERNAKAN
 - 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya



X. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

1. DINAS PEKERJAAN UMUM

- 1) Program Pembangunan jalan dan Jembatan
- 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan
- 3) Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
- 4) Program pembangunan jalan tol
- 5) Program pembukaan keterisolising wilayah sektor jalan dan jembatan
- 6) Program penyediaan dan pengolahan air baku
- 7) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah
- 8) Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air
- 9) Program Pengendalian Banjir
- 10) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

2. DINAS PERHUBUNGAN

- 1) Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
- 2) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan
- 4) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara

3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Program sarana dan prasarana telekomunikasi

XI. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1. INSPEKTORAT

- 1) Program Pengembangan Zona Integritas
- 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN
- 3) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

2. BIRO ORGANISASI

- 1) Program Penguatan Kelembagaan PTSP
- 2) Program peningkatan pelayanan publik
- 3) Program Peningkatan Kualitas Manajemen berbasis kinerja



4. BIRO KEUANGAN
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 - 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 1) Program Integrasi Aplikasi
7. KESBANGPOL
 - 1) Program Pendidikan politik masyarakat
8. BIRO PEMERINTAHAN
 - 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

XII. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1. DINAS KEHUTANAN
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan KPH
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Rehabilitasi Hutan Mangrove
 - 4) Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi
2. DINAS PEKERJAAN UMUM
 - 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. DINAS PERTAMBANGAN A DAN ENERGI
 - 1) Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang
4. DINAS PERKEBUNAN
 - 1) Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan
5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup



- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 4) Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 5) Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan lingkungan hidup
- 6) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
- 7) Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
- 8) Investasi emisi gasrumah kaca

6. BAPPEDA

- 1) Program Pengaruh pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, sasaran program, Instansi Penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rancangan Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016. Pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.275.501.500.000 dan Belanja langsung sebesar Rp. 5.355.340.000.000,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 401.450.458.954,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.620.313.403.244,- berdasarkan alokasi tersebut Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 diuraikan pada matrik Rencana Program/Kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran :



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016

LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017



LAMPIRAN :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016